

## IMPLEMENTASI PEMBELAJARAN PAI BERBASIS KURIKULUM MERDEKA DI SMP NEGERI 5 SIBOLGA

**Tetti Anita Dewi Munte**

SMP Negeri 5 Sibolga

tettimunte@gmail.com

---

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka di SMP Negeri 5 Sibolga. Metode penelitian ini berupa studi deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan verifikasi, serta dinyatakan absah melalui teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Proses formulasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah atau pertemuan. Pertemuan tersebut dalam bentuk musyawarah atau Rakerja (rapat kerja), selain itu dilakukan kegiatan seminar dan diskusi. Dalam rapat dan musyawarah kepala sekolah melakukan diskusi untuk mencari formulasi dan solusi untuk menentukan suatu kebijakan dalam membangun dan mengarahkan SMP Negeri 5 Sibolga; dan (2) Langkah-langkah implementasi kebijakan dalam implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga dengan men-sosialisasikan terhadap guru-guru serta melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap guru-guru dalam memahami kurikulum agar dapat diimplementasikan dengan baik.

**Kata Kunci:** Kurikulum Merdeka, Pembelajaran PAI.

### Abstract

*This study aims to describe the implementation of independent curriculum-based PAI learning at SMP Negeri 5 Sibolga. This research method is a descriptive study with a qualitative approach. Data obtained using observation techniques, interviews, and documentation. Data analysis used data reduction techniques, data presentation, and verification, and was declared valid through triangulation techniques. The results of this study indicate that (1) The process of policy formulation in developing the SMP Negeri 5 Sibolga curriculum is in the form of carrying out deliberations or meetings. The meeting is in the form of a deliberation or work meeting (work meeting), apart from that seminars and discussions are held. In meetings and deliberations the head of the madrasa holds discussions to find formulations and solutions to determine a policy in building and directing SMP Negeri 5 Sibolga; and (2) Policy implementation steps in curriculum implementation at SMP Negeri 5 Sibolga by outreach to teachers and conducting training and guidance to teachers in understanding the curriculum so that it can be implemented properly.*

**Keywords:** *Independent Curriculum, PAI Learning*

### PENDAHULUAN

Pengembangan pengetahuan dan keilmuan pada individu diperoleh melalui sarana pendidikan (Amin, *et.al.*, 2019: 200-220). Dalam konteks ini, lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam menyusun konsep dan mengkontekstualisasikan kurikulum pembelajaran berbasis Islami dan berkualitas bagi siswa (sesuai kebutuhan masyarakat) (Qolbi & Hamami, 2021: 1120-1132). Program dan kegiatan pendidikan secara teoretis dan operasional pada satuan lembaga pendidikan Islam berpedoman kokoh pada dasar-dasar atau prinsip-prinsip yang bersumber al-Qur'an dan hadis (ajaran Islam) (Mulyani & Haliza, 2021: 101-109).

Keberadaan lembaga pendidikan Islam di Indonesia idealnya telah mapan dan cukup memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap karir, kesejahteraan, dan eksistensi kepribadian Muslim (Widyawati, 2013). Praktiknya, lembaga pendidikan Islam dituntut mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, berkepribadian, dan memiliki karakter mulia dalam membangun bangsa yang berdaulat (Hafidhoh, 2016: 88-

106). Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam berperan besar dalam membangun pendidikan berbasis kebutuhan masyarakat.

Sekolah berbasis keislaman sebagai salah satu polarisasi lembaga pendidikan di Indonesia mengkombinasi pembelajaran agama dan umum secara integral dan interkoneksi, kemudian menggunakan sistem penilaian, dan “menawarkan” sertifikat (ijazah) kepada lulusan (Yaqin, 2016: 93-105). Hal ini menunjukkan bahwa eksistensi sekolah didasari oleh munculnya semangat pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.

Kurikulum pembelajaran sekolah swasta Islam relevan (sama) dengan kurikulum yang dipraktikkan di sekolah umum dan juga madrasah, bahkan menambahkan kajian keislaman sebagai ciri khas lembaga pendidikan Islam. Sulistyorini (2012) mengistilahkan sekolah berbasis keislaman sebagai sekolah bernilai *plus* karena kombinasi kurikulum pembelajaran. Sekolah sebagai suatu kelembagaan pendidikan Islam, diminati oleh banyak masyarakat secara kuantitatif (peningkatan jumlah peserta didik setiap tahun) dan kualitatif (lulusan sekolah menduduki jabatan strategis di berbagai instansi dan juga bermartabat di tengah masyarakat).

Pengelolaan sekolah yang efektif didasarkan pada penyusunan kurikulum yang tepat sebagai landasan proses (sistem) pembelajaran. Kuntoro (2019: 84-97) menjelaskan bahwa sekolah yang unggul (bermutu) ialah sekolah yang memiliki kurikulum bermutu. Sebab, perkembangan zaman terasa semakin cepat (pesat), sehingga harus diimbangi dengan penyesuaian dan *upgrade* kurikulum berbasis kebutuhan masyarakat. Bahkan, kurikulum yang diterapkan oleh suatu sekolah menjadi pembeda proses dan hasil pendidikan dengan sekolah lainnya.

Keberhasilan sekolah dalam perkembangannya, tidak terlepas dari manajemen dan pengembangan kurikulum. Tentu, pengembangan yang dimaksud menjadi upaya sekolah *up to date* terhadap berbagai perubahan dalam menyiapkan kreasi dan inovasi yang tepat kepada siswa (Priatmoko, 2018: 221-239). Selain itu, dibutuhkan juga penanaman karakter berbasis agama dan kearifan lokal yang ada, sehingga menjadi pondasi dan bekal bagi siswa di masa depan. Inilah yang disebutkan oleh Umar & Ismail (2018) sebagai prinsip dasar dalam pelaksanaan pengembangan kurikulum sekolah.

Lebih lanjut, Baharun (2016: 243-262) menjelaskan bahwa proses atau tahapan dalam manajemen pengembangan kurikulum minimal ada 4 (empat), yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam konsepsi tahapan tersebut, perencanaan memiliki peran urgen bagi keberlanjutan proses dan program di sekolah, meliputi pendidikan karakter, struktur kurikulum, media (komponen) perangkat pembelajaran, dan alokasi anggaran (Mundiri, 2016). Keempat aspek inilah yang menjadi landasan dasar dalam menetapkan program pada agenda rapat perencanaan pembelajaran.

Selanjutnya, perorganisasian kurikulum pada setiap mata pelajaran diklasifikasi menjadi beberapa bidang studi, termasuk pendidikan agama Islam (akidah akhlak, fikih, al-Qur'an hadis, dan sejarah pendidikan Islam) (Azzahra & Arif, 2021: 9-20). Dalam tataran pelaksanaannya, kurikulum PAI didasarkan pada pendidikan (internalisasi) karakter, meliputi program dan kebijakan sekolah yang ditetapkan oleh kepala sekolah, kreasi dan inovasi guru ketika mengajar, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis nilai dan karakter, keteladanan, dan kegiatan ekstrakurikuler (Priyatna, 2017: 21). Kemudian, kurikulum dievaluasi berkaitan dengan kinerja guru, metode pembelajaran, perkembangan siswa, dan hubungan kerjasama dengan wali siswa (Indrioko, 2016: 61-76). Dengan manajemen kurikulum yang baik diharapkan kurikulum sekolah dapat mengembangkan potensi peserta didik secara maksimal sehingga kurikulum yang diterapkan merupakan kurikulum yang unggul dan tepat.

Kurikulum yang unggul merupakan kurikulum yang dihasilkan dari manajemen yang baik (Aakhiruddin, 2015: 195-219). Pengembangan manajemen kurikulum yang baik tentunya bersumber dari kebijakan pengambil keputusan. Kebijakan merupakan keputusan baik berupa peraturan, maupun perundang-undangan yang menjadi pedoman pelaksanaan program suatu lembaga atau organisasi (Wahyuni, 2018: 64-79). Jadi, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah/lembaga sehingga dengan hal itu mereka mengejar tujuan yang diinginkannya. Model implementasi kebijakan menurut para ahli kebijakan yang secara skematis. Tujuan implementasi kebijakan secara sederhana adalah untuk menentukan arah agar tujuan kebijakan dapat direalisasikan sebagai hasil dari kegiatan pemerintah (Nuryana, 2017: 11-19). Penetapan kebijakan baru bisa dimulai apabila tujuan dan sasaran yang semula bersifat umum telah dirinci untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan tersebut.

Kebijakan pendidikan menentukan keberhasilan tujuan pendidikan (Rahman, 2018: 1-14). Salah satu contoh pelaksanaan kebijakan pendidikan karakter di suatu lembaga pendidikan berjalan dengan baik meskipun ada beberapa kendala (Zen, 2016). Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, dilakukan strategi yang dilaksanakan dengan cara yaitu: (1) meningkatkan profesionalisme dan jiwa “*among*” guru, (2) melaksanakan

metode pendidikan budi pekerti dengan metode “*ngerti, ngrasa, nglakoni*”, (3) menguatkan peran orang tua dan masyarakat dengan cara meningkatkan peran komite sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari budaya sekolah, proses penyusunan program pembelajaran dalam menanamkan nilai-nilai karakter dan pelaksanaan pembelajaran dalam menanamkan pendidikan karakter, serta bentuk evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan penanaman nilai-nilai karakter tersebut.

Kedudukan nilai agama bahkan tidak boleh berbenturan dengan nilai-nilai hak asasi manusia, dan nilai keagamaan sejajar susunannya dengan nilai-nilai kultural, padahal seharusnya kedudukan agama harus lebih tinggi dari hanya sekadar hak asasi manusia (Fadilah & Hamami, 2021: 4186-4197). Selain itu, apabila ditelaah beberapa ketentuan dalam UU No. 20 Tahun 2003, didapati banyak isinya yang tidak selaras, bertentangan antara satu ayat dan pasal dengan ayat dan pasal lain, bahkan bertentangan dengan sistem pendidikan Islam dan UUD 1945. Sebab itu, undang-undang tersebut perlu direvisi agar sesuai dengan ajaran agama mayoritas di Indonesia yaitu Islam. Pandangan hal tersebut adalah wajar untuk berusaha dan berupaya mewujudkan pendidikan yang mengembangkan potensi peserta didik secara islami dan berkualitas. Ada lima potensi/ranah yang harus ditumbuhkan dan dikembangkan dalam diri peserta didik, yaitu: potensi pikir (kecerdasan intelektual), potensi rasa (kecerdasan sosial), potensi karsa (kecerdasan jiwa/psikis), potensi religi (kecerdasan spiritual), dan potensi raga/fisik (kecerdasan kinestetik).

Berdasarkan hal tersebut SMP Negeri 5 Sibolga sebagai lembaga yang mengatur dan pembuat kebijakan pendidikan dalam pengembangan kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga. Sejatinya, SMP Negeri 5 Sibolga memiliki kurikulum yang sama. Namun kenyataan di lapangan pada studi awal diperoleh informasi bahwa antara satu sekolah dengan sekolah lain memiliki perbedaan kurikulum baik dari batas pelajaran yang dipelajarinya. Di sinilah ketertarikan dalam melakukan miniresearch di SMP Negeri 5 Sibolga.

Sejatinya, kajian akademik tentang implementasi kebijakan kurikulum telah diteliti dari berbagai sudut pandang. Di antaranya Firmansyah (2007) membahas dari aspek kendala (hambatan) dalam implementasi kurikulum, Ardianingsih, *et.al.* (2017: 21-30) membahas dari sudut pandang peran serta guru dalam proses implementasi kurikulum, Marhaeni (2015) mendeskripsikan kajian asesmen autentik dalam kurikulum 2013, Ma'rufah (2020: 125-136) meneliti terkait tema menciptakan budaya religius pada siswa, Turmuzi & Wahidaturrahmi (2021: 341-354) membahas tentang kompetensi profesional dan pedagogik pendidik, Fahmi & Bitasari (2020: 81-91) membahas tentang upaya revitalisasi kurikulum dan komponennya. Selanjutnya, tema tentang pengembangan kurikulum (Azis, 2018: 44-50; Ikhsan & Hadi, 2018: 193-202), kurikulum pendidikan dasar (Ningrum & Sobri, 2015: 416-423; Yusuf, 2018: 263-278; Rahelly, 2018: 381-390; Suherman, 2014: 71-76), serta kurikulum pendidikan karakter (Manab, 2018; Islam, 2017: 89-100; Novitasari, *et.al.*, 2019: 79-86; Maulida, *et.al.*, 2015: 11-19).

Mencermati uraian di atas, dipahami kajian akademik tentang implementasi kebijakan kurikulum dibahas seputar tema pengembangan, re-orientasi, revitalisasi, hingga evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Penelitian ini berupaya mengkaji “sisi kosong” yang belum diteliti sebelumnya, yakni dari aspek kebijakan internal sekolah, meliputi fungsi-fungsi manajemen. Penelitian dimaksud terangkum dalam judul penelitian, “*Implementasi Pembelajaran PAI Berbasis Kurikulum Merdeka di SMP Negeri 5 Sibolga*”.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi deskriptif. Penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan atau literatur kepustakaan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga. Dengan penelitian ini, diharapkan terdapat data yang berupa kata atau makna untuk menjelaskan keadaan yang sebenarnya secara mendalam apa yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam mengimplementasikan kurikulum pembelajaran. Untuk mengumpulkan data penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipan, wawancara mendalam terstruktur, dan dokumentasi (Assingkily, 2021). Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, hingga penarikan kesimpulan (verifikasi). Uji keabsahan data penelitian menggunakan teknik triangulasi dan ketekunan pengamatan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### ***Proses Formulasi Kebijakan SMP Negeri 5 Sibolga dalam Pengembangan Kurikulum Pembelajaran PAI***

Kebijakan internal sekolah merupakan kombinasi penerapan kebijakan kurikulum pendidikan nasional dan kearifan lokal masyarakat pada satuan lembaga pendidikan (Alfiansyah, *et.al.*, 2020: 52-67). Dalam konteks ini, sekolah melakukan serangkaian tindakan dalam upaya memilih alternatif terbaik untuk sekolah. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah formulasi kebijakan sekolah (Sudarman, 2019: 195-225).

Proses formulasi kebijakan sekolah perlu memperhatikan berbagai aspirasi dan kebutuhan “pengguna jasa sekolah”. Selain itu, diperlukan juga analisis kebijakan berbasis perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (Munajat, 2016). Dalam konteks ini, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menetapkan keputusan-keputusan resmi lembaga, berupa persetujuan, pengubahan, atau penolakan suatu alternatif kebijakan. Kepala sekolah bersama *stakeholder* sekolah yang melakukan kegiatan perencanaan formulasi kebijakan secara intens dan serius, berarti sedang melakukan perencanaan keberhasilan kebijakan pendidikan (Suryanto, 2017). Sebab, perencanaan memiliki peran penting bagi proses pelaksanaan dan pencapaian suatu program.

Dalam formulasi kebijakan SMP Negeri 5 Sibolga dalam pengembangan kurikulum sekolah sesuai dengan aturan yang dibuat. Proses formulasi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan pemerintah. Berdasarkan hal tersebut, maka yang berhak membuat kebijakan tentang pendidikan termasuk kebijakan pengembangan kurikulum pendidikan adalah pemerintah dan pengembangannya kepala sekolah agar menjadikan sekolah maju dan bermutu (Prayoga, *et.al.*, 2019: 70-84). Hal ini didasarkan pada fungsi kurikulum sebagai pengarah, pedoman, dan landasan dalam proses pembelajaran di sekolah (Takdir, *et.al.*, 2020: 210-229).

Praktik proses formulasi kebijakan sekolah, kepala sekolah perlu melibatkan seluruh unsur sekolah, mulai dari guru, tenaga kependidikan, hingga komite sekolah (Lestari, 2021: 118-129). Selanjutnya, dibutuhkan peran besar guru dalam mengimplementasikan kurikulum sekolah, sebab guru adalah “garda terdepan” dalam kegiatan pembelajaran bersama siswa (Ikhwan, 2014: 182-200). Atas dasar ini, guru “wajib” terlibat dalam proses penyusunan kebijakan kurikulum, sehingga berbagai aspirasi dan kebutuhan selama proses pendidikan dapat tersampaikan dalam agenda rapat kurikulum sekolah (Yanto & Fathurrochman, 2019: 123-130).

Pendidik sebagai fasilitator pembelajaran di kelas, membutuhkan 4 (empat) kompetensi dasar, yakni kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional (Andina, 2018: 204-220). Peranan pendidik dalam perencanaan kurikulum sekolah, menjadi sangat penting didasarkan pada tugas pendidik sebagai penyeimbang (penyesuai) antara konsep dan praktik kurikulum (Baharun, 2018: 1-26). Dengan demikian, pendidik tidak boleh terpaku atau kaku pada fasilitas yang ada, melainkan harus mampu mengkreasikan dan melakukan inovasi dalam setiap pembelajaran.

Pemahaman pendidik (guru) terkait kurikulum menjadi faktor penentu efektivitas pembelajaran di kelas. Werdayanti (2008) menyebut bahwa guru memiliki multitugas dalam kontekstualisasi kurikulum, yakni sebagai tim perencana, pemikir, pengembang, pelaksana, hingga evaluator kurikulum. Mengacu pada Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003, dipahami bahwa perkembangan teknologi yang begitu pesat meniscayakan terjadinya pembaruan sistem pendidikan dalam tempo singkat. Untuk itu, guru tidak boleh terpaku pada perihal administratif, melainkan menghadirkan kreasi dan inovasi dalam setiap proses pembelajaran.

Lebih lanjut, guru lebih diberikan kesempatan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Sehingga guru tidak dibebani dengan tugas-tugas penyusunan silabus (Dudung, 2018: 9-19). Dalam implementasi kurikulum yang baru, beberapa faktor seperti sumber daya sekolah, masyarakat, kepala sekolah, guru, dan faktor eksternal harus diperhatikan dan dipersiapkan secara maksimal. Idealnya, tujuan disusunnya kurikulum adalah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang seirama dengan perkembangan peserta didik serta kebutuhan pembangunan nasional. Mengenai hal ini, perkembangan ilmu pengetahuan teknologi informasi serta seni budaya juga perlu dipertimbangkan dalam mengkonstruksi kurikulum tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka perubahan kurikulum merupakan suatu kewajiban, walau pada dasarnya jika kurikulum dibentuk dengan kompleks dan baik dengan melihat perkembangan untuk masa datang tentu kurikulum tidak terlalu diubah secara menyeluruh tetapi hanya pengembangan saja (Mahmudi, 2009). Tetapi pada dasarnya di Indonesia melakukan perubahan kurikulum mengarah kepada perbaikan-perbaikan sistem kurikulum itu sendiri, maka hal inilah yang menjadi suatu kendala karena pola pikir pendidik harus diubah dari pola pikir awam dan kaku menjadi lebih modern. Penjelasan lain tentang perubahan kurikulum karena disebabkan oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, hal ini memberikan suatu perubahan dalam pendekatan dalam pengajaran, yaitu dari pendekatan tradisional ke pendekatan mutakhir (Supandi, *et.al.*, 2020). Jadi, dapat dipahami bahwa kurikulum memiliki sifat yang dinamis, karena dituntut oleh perkembangan dan tantangan zaman.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proses formulasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah atau pertemuan. Pertemuan tersebut dalam bentuk musyawarah atau Rakerja (rapat kerja), selain itu dilakukan kegiatan seminar dan diskusi. Dalam rapat dan musyawarah kepala sekolah melakukan diskusi untuk mencari formulasi dan solusi untuk menentukan suatu kebijakan dalam membangun dan mengarahkan SMP Negeri 5 Sibolga.

### ***Implementasi Kebijakan SMP Negeri 5 Sibolga dalam Penerapan Kurikulum***

Proses implementasi kebijakan implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga dilakukan melalui sosialisasi pada forum rapat dewan guru, kemudian disampaikan dalam rapat tersebut dan sekaligus dilakukan proses diskusi (Yuliah, 2020: 129-153). Usulan atau tanggapan dari dewan guru akan ditampung dan didiskusikan bersama. Setelah ada kebijakan yang dibuat oleh majelis pendidikan, maka sekolah akan mempertimbangkan keadaan kesanggupan (kondisi) sekolah apakah bisa sesegera mungkin untuk dilaksanakan atau akan dilaksanakan secara bertahap.

Pelaksanaan kebijakan dalam implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga yang pernah dilaksanakan dengan membekali tenaga pendidik berupa pelatihan dan *workshop* seperti yang pernah dilakukan pelatihan kepala sekolah yang dilanjutkan dengan pelatihan dan *workshop* guru-guru. Karakteristik kebijakan antara lain yaitu: memiliki tujuan pendidikan yang jelas dan terarah, memiliki aspek legal formal hingga dapat dinyatakan sah dan resmi berlaku serta memiliki konsep operasional agar dapat diimplementasikan.

Kendala yang paling utama dalam mengoptimalkan implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga adalah nilai-nilai sikap dan banyaknya pembebanan materi bahasan dalam kurikulum dengan waktu yang terbatas. Hal ini berdampak dalam pelaksanaannya adalah ketika pendidik mempersiapkan yang mampu merangkul dari keseluruhannya sehingga setiap program tidak akan efektif dan efisien dalam pencapaiannya.

Konstruksi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga merupakan perpaduan antara kompetensi dan karakter yang terintegrasi dalam kurikulum, tujuannya adalah agar siswa dapat merelisasikan pengetahuannya dengan menginternalisasi nilai-nilai karakter dan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga dalam pelaksanaannya merupakan tanggung semua pihak. Jadi diperlukan suatu koordinasi dengan menjalin kerjasama antara sekolah, orang tua dan pemerintah dalam semua aspek. Dapat dikatakan bahwa dalam kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga merupakan kurikulum yang lahir dari pengembangan dalam dunia kerja.

Dalam konteks implementasi kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga, merupakan upaya penyempurnaan kurikulum dengan tujuan mewujudkan generasi yang mampu bersaing dengan perubahan zaman. Berbagai kendala ditemukan setelah berjalannya kurikulum tersebut di antaranya berkaitan dengan anggaran, kesiapan pemerintah untuk merealisasikan kurikulum 2013. Kendala tersebut bisa terjadi pada hal lainnya, sehingga menghambat kesiapan guru dalam mencapai keberhasilan dalam implementasi kurikulum 2013 tersebut. Untuk pelaksanaan implementasi kurikulum terhadap guru dalam proses pembelajaran maka dilakukan hal sebagai berikut:

#### **1. Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum**

Guru sebagai garda terdepan dalam implementasi kurikulum harus menjadi perhatian penting (Baidowi, 2020: 85-102). Guru adalah seseorang yang berhadapan langsung dengan peserta didik dalam pembelajaran sehingga memberikan pengaruh langsung terhadap keberhasilan peserta didik dalam menyelesaikan tugas pembelajaran. Kurikulum 2013 membawa perubahan mendasar peran guru dalam pembelajaran (Solichin, 2015: 148-178). Secara administratif, pemerintah pusat telah menyiapkan perangkat pelaksanaan pembelajaran yang tidak perlu lagi disiapkan oleh guru. Namun demikian, guru dituntut berperan secara aktif sebagai motivator dan fasilitator pembelajaran sehingga siswa akan menjadi pusat belajar. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi guru karena tidak semua guru memiliki kompetensi tersebut.

Selain itu, guru dituntut kesiapannya untuk melaksanakan kurikulum dalam waktu yang relatif singkat sementara perangkatnya belum disiapkan secara matang. Bukan hal yang mudah untuk mempersiapkan guru yang ideal seperti harapan kurikulum dalam waktu singkat, terutama untuk mengubah *mindset* guru dari asalnya hanya bertugas untuk mengajar sementara dalam kurikulum 2013 guru harus mampu mengarahkan siswa untuk aktif, produktif, kreatif, dan berpikir kritis (Indriawati, 2013).

#### **2. Pelatihan Guru**

Kurikulum yang diimplementasikan di SMP Negeri 5 Sibolga mengharuskan guru berperan optimal dalam pembelajaran. Untuk menyiapkan guru ideal dalam kurikulum 2013 diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus. Pemerintah menilai proses pelatihan guru telah diupayakan menggunakan model dan metode pelatihan yang sesuai. Karena itu, guru diharapkan dapat memahami model dan metode pelatihan tersebut, serta dapat mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Proses penyiapan guru melalui pelatihan harus ditekankan pada perbaikan kualitas guru, dan hal ini harus ditunjang dengan pelatihan yang berkualitas pula. Hal ini yang harus terus ditingkatkan sehingga pelatihan bukan hanya sekedar formalitas kegiatan (Aisah, *et.al.*, 2021: 128-135).

### 3. Pendampingan, Pembinaan, dan Klinik Guru

Pelatihan yang diberikan kepada guru selanjutnya didampingi serta dilakukan pembinaan dengan tujuan untuk mengawasi agar pemahaman terhadap kurikulum menjadi lebih baik dan mampu memberikan pemahaman terhadap guru lainnya (Manurung, *et.al.*, 2021: 36-42). Kegiatan ini direalisasikan oleh pemerintah melalui program Klinik Konsultasi Pembelajaran (K2P).hal ini bertujuan untuk membuka forum konsultasi kepada seluruh guru yang belum memahami kurikulum 2013 sekaligus untuk memberikan pelatihan terhadap guru agar mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi.

Komponen dalam sistem pendidikan yang terpenting salah satunya adalah kurikulum pendidikan, hal ini merupakan penjabaran dari ide dan gagasan yang dicita-citakan oleh masyarakat yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Dalam kurikulum pendidikan, maka arah pendidikan akan diketahui dan terarah yang menjadi alternatif dalam pendidikan yang meliputi hasil pendidikan yang telah direncanakan dan berbagai aktivitas pendidikan (Risdiatoro, 2021: 144-157). Maka, tidak mengherankan dalam masyarakat pendidikan kajian mengenai kurikulum menjadi bahan kajian yang menarik dan aktual. Kajian yang menarik tersebut menjadi sesuatu yang aktual karena tuntutan terhadap perubahan-perubahan global dan persaingan pasar bebas.

Perubahan tersebut memaksakan lembaga pendidikan untuk mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga peran kurikulum menjadi sangat penting dalam perbaikan pendidikan itu sendiri (Setiawan, 2018: 167-176). Di sisi lain kurikulum juga sangat penting dalam merealisasikan pendidikan melalui pemerataan layanan transparan, berkeadilan, dan demokratis (Muhali, 2019: 28-36). Maksudnya, kurikulum yang baik dapat menjadikan lembaga pendidikan yang transparan dan terarah sesuai dengan kondisi dalam lingkungan sosial sekolah itu sendiri. Jadi, sekolah sebagai lembaga pendidikan yang merupakan bagian dari masyarakat menjadi suatu wadah untuk mengembangkan peserta didik melalui iklim pembelajaran yang demokratis proses belajar yang menyenangkan.

Tujuannya adalah agar alumni dari peserta didik mampu menjadi SDM yang kompeten, rasional dan kreatif dalam membangun masa depan yang mampu menghadapi tantangan perubahan zaman. Maka realisasi dari tujuan tersebut adalah melakukan perubahan yang menuntut sistem pendidikan efektif dan efisien terhadap mata pelajaran yang diberikan terhadap peserta didik sehingga mampu memberikan bekal untuk bersaing dengan dunia yang luas. Tentu dalam hal ini, melakukan perubahan tersebut sangat berkaitan dengan kurikulum lembaga pendidikan itu sendiri. Melalui kurikulum efektif, maka akan memberikan pengaruh terhadap komponen-komponen dalam sistem pendidikan lainnya. Sebagai cita-cita pendidikan nasional, yaitu membentuk peserta didik yang berkarater, maka dalam hal ini perubahan kurikulum yang dilakukan juga mengarah ke ranah tersebut juga, yaitu kurikulum berbasis kompetensi sekaligus berbasis karakter.

Tujuannya adalah peserta didik akan dibekali dengan berbagai sikap dan kemampuan untuk menjawab tuntutan perkembangan zaman yang berbasis teknologi (Roza, 2016: 137-146). Perubahan dalam kurikulum tersebut sangat penting agar pembangunan masyarakat dan kesejahteraan sosial dapat direalisasikan sehingga masyarakat dapat adaptif terhadap berbagai perubahan. Dengan demikian, dipahami bahwa langkah-langkah implementasi kebijakan dalam implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga dengan men-sosialisasikan terhadap guru-guru serta melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap guru-guru dalam memahami kurikulum agar dapat diimplementasikan dengan baik.

### SIMPULAN

Berdasarkan pemaparan temuan dan diskusi di atas, dapat disimpulkan bahwa (1) Proses formulasi kebijakan dalam pengembangan kurikulum SMP Negeri 5 Sibolga berupa pelaksanaan kegiatan musyawarah atau pertemuan. Pertemuan tersebut dalam bentuk musyawarah atau Rakerja (rapat kerja), selain itu dilakukan kegiatan seminar dan diskusi. Dalam rapat dan musyawarah kepala madrasah melakukan diskusi untuk mencari formulasi dan solusi untuk menentukan suatu kebijakan dalam membangun dan mengarahkan SMP Negeri 5 Sibolga; dan (2) Langkah-langkah implementasi kebijakan dalam implementasi kurikulum di SMP Negeri 5 Sibolga dengan men-sosialisasikan terhadap guru-guru serta melakukan pelatihan dan bimbingan terhadap guru-guru dalam memahami kurikulum agar dapat diimplementasikan dengan baik.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aisah, H., Zaqiah, Q.Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (AKM): Analisis Implementasi Kebijakan AKM. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128-135. <https://www.ejournal.stit-qluraniyah.ac.id/index.php/jpia/article/view/25>.
- Akhiruddin, K.M. (2015). Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara. *Tarbiya: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 1(1), 195-219. <http://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jurnal-tarbiya/article/view/143>.
- Alfiansyah, M., Assingkily, M.S., & Prastowo, A. (2020). Kebijakan Internal Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MI Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta. *MAGISTRA: Media Pengembangan Ilmu Pendidikan Dasar dan Keislaman*, 11(1), 52-67. <https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/MAGISTRA/article/view/3460>.
- Amin, M., Sugiarno, S., & Fathurrochman, I. (2019). Pengembangan Keilmuan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Tinjauan Futurologi Pendidikan dan Pengembangan Kurikulum. *Tadbir: Jurnal Studi Manajemen Pendidikan*, 3(2), 200-220. <http://repository.iaincurup.ac.id/687/>.
- Andina, E. (2018). Efektivitas Pengukuran Kompetensi Guru. *Aspirasi: Jurnal Masalah-masalah Sosial*, 9(2), 204-220. <http://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/1103>.
- Ardianingsih, F., Mahmudah, S., & Rianto, E. (2017). Peran Guru dalam Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Khusus pada SLB di Sidoarjo. *Jurnal Pendidikan: Teori dan Praktik*, 2(1), 21-30. <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jp/article/view/917>.
- Assingkily, M.S. (2021). *Metode Penelitian Pendidikan: Panduan Menulis Artikel Ilmiah dan Tugas Akhir*. Yogyakarta: K-Media.
- Azis, R. (2018). Implementasi Pengembangan Kurikulum. *Jurnal Inspiratif Pendidikan*, 7(1), 44-50. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/4932>.
- Azzahra, I.M., & Arif, M. (2021). Tuntutan dan Pengembangan Studi Islam di Perguruan Tinggi. *At Turots: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1), 9-20. <http://journal.stitmadani.ac.id/index.php/JPI/article/view/57>.
- Baharun, H. (2016). Manajemen Kinerja dalam Meningkatkan Competitive Advantage pada Lembaga Pendidikan Islam. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 5(2), 243-262. <http://ejournal.inismupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/21>.
- Baharun, H. (2018). Peningkatan Kompetensi Guru Melalui Sistem Kepemimpinan Kepala Madrasah. *At-Tajdid: Jurnal Ilmu Tarbiyah*, 6(1), 1-26. <https://ejournal.isimupacitan.ac.id/index.php/tajdid/article/view/38>.
- Baidowi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan pada Masa Pandemi Covid-19. *Jambura Journal of Educational Management*, 85-102. <https://ejournal-fip-ung.ac.id/ojs/index.php/JJEM/article/view/167>.
- Dudung, A. (2018). Kompetensi Profesional Guru. *JKKP: Jurnal Kesejahteraan Keluarga dan Pendidikan*, 5(1), 9-19. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jkkp/article/view/6451>.
- Fadilah, L., & Hamami, T. (2021). Kepemimpinan Transformasional dalam Pendidikan Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 4186-4197. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/1381>.
- Fahmi, F., & Bitasari, W. (2020). Revitalisasi Implementasi Kurikulum Pendidikan. *Al-Fikru: Jurnal Ilmiah*, 14(2), 81-91. <http://jurnal.staiserdanglubukpakam.ac.id/index.php/alfikru/article/view/30>.
- Firmansyah, F. (2007). Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (Struktur dan Kendalanya). *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(1). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/tadris/article/view/207>.
- Hafidhoh, N. (2016). Pendidikan Islam di Pesantren antara Tradisi dan Tuntutan Perubahan. *Muaddib: Studi Kependidikan dan Keislaman*, 6(1), 88-106. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/muaddib/article/view/161>.
- Ikhsan, K.N., & Hadi, S. (2018). Implementasi dan Pengembangan Kurikulum 2013. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 6(1), 193-202. <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/edukasi/article/view/1682>.
- Ikhwan, A. (2014). Akreditasi Madrasah Aliyah (MA) dalam Kebijakan Pendidikan Nasional. *Edukasi: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2), 182-200. <http://ejournal.staim-tulungagung.ac.id/index.php/edukasi/article/view/64>.
- Indriawati, P. (2013). Implementasi Kebijakan Tugas Guru Pembimbing Khusus pada Pendidikan Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Junrejo Batu. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*, 1(1). <https://202.52.52.7/index.php/jkpp/article/view/1508>.

- Indrioko, E. (2016). Lembaga Pendidikan Islam dalam Menghadapi Derasnya Perubahan. *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 3(1), 61-76. <http://ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/63>.
- Islam, S. (2017). “Karakteristik Pendidikan Karakter, Menjawab Tantangan Multidimensional Melalui Implementasi Kurikulum 2013” *EDURELIGIA: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 89-10. <http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/edureligia/article/view/50>.
- Kuntoro, A.T. (2019). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Jurnal Kependidikan*, 7(1), 84-97. <http://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/jurnalkependidikan/article/view/2928>.
- Lestari, S. (2021). Analisis Kebijakan Pendidikan MI Perspektif Lingkungan Pendidikan Sekolah/Madrasah. *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(1), 118-129. <http://jurnal.permapendis-sumut.org/index.php/edusociety/article/view/32>.
- Ma'rufah, A. (2020). Implementasi Kurikulum Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (Upaya Mewujudkan Budaya Religius di Sekolah). *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 125-136. <http://www.jurnaledukasia.org/index.php/edukasia/article/view/6>.
- Mahmudi, A. (2009). Mengembangkan Kompetensi Guru Melalui Lesson Study. *Jurnal Forum Kependidikan FKIP UNSRI*, 28(2), 1-10. [http://staffnew.uny.ac.id/upload/132240454/penelitian/23%20Turnitin\\_Forum\\_Kependidikan\\_2009\\_LS\\_ali\\_mahmudi.pdf](http://staffnew.uny.ac.id/upload/132240454/penelitian/23%20Turnitin_Forum_Kependidikan_2009_LS_ali_mahmudi.pdf).
- Manab, H.A. (2018). Implementasi Kurikulum Pendidikan Karakter Pendekatan Konfluensi. *Repository UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung*. <http://repo.uinsatu.ac.id/10154/1/Implementasi%20Kurikulum%20Pendidikan%20Karakter%20Pendekatan%20Konfluensi.pdf>.
- Manurung, I.D., Hasibuan, S.H., & Yusriati, Y. (2021). Pelatihan Penyusunan Soal HOTS (Higher Order Thinking Skills) Bagi Guru-Guru Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal PRODIKMAS: Hasil Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 36-42. <http://journal.umsu.ac.id/index.php/prodikmas/article/view/7674>.
- Marhaeni, A.A.I.N. (2015). Asesmen Autentik dan Pendidikan Bermakna: Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 4(1). <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JPI/article/view/4889>.
- Maulida, M., Wati, M., & An'nur, S. (2015). Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Pendidikan Karakter dalam Mendukung Implementasi Kurikulum 2013. *Berkala Ilmiah Pendidikan Fisika*, 3(1), 11-19. <http://ppjp.unlam.ac.id/journal/index.php/bipf/article/download/760/pdf>.
- Muhali, M., Asy'ari, M., Prayogi, S., Samsuri, T., Karmana, I.W., Sukarma, I.K., ... & Hunaepi, H. (2019). Pelatihan Kegiatan Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Bagi Guru Madrasah Aliyah Negeri 3 Lombok Tengah. *Abdihaz: Jurnal Ilmiah Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 28-36. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/abdihaz/article/view/739>.
- Mulyani, F., & Haliza, N. (2021). Analisis Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*, 3(1), 101-109. <http://www.jpdk.org/index.php/jpdk/article/view/83>.
- Munajat, N. (2016). Kebijakan Manajemen Berbasis Madrasah dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Islam. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 8(2). <https://www.jurnal.albidayah.id/index.php/home/article/view/74>.
- Mundiri, A. (2016). Strategi Lembaga Pendidikan Islam dalam Membangun Branding Image. *Pedagogik: Jurnal Pendidikan*, 3(2). <http://ejournal.unuja.ac.id/index.php/pedagogik/article/view/125>.
- Ningrum, E.S., & Sobri, A.Y. (2015). Implementasi Kurikulum 2013 di Sekolah Dasar. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 24(5), 416-423. <http://ap.fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/05/volume-24-no.-564-71.pdf>.
- Novitasari, R.D., Wijayanti, A., & Artharina, F.P. (2019). Analisis Penerapan Penguatan Pendidikan Karakter Sebagai Implementasi Kurikulum 2013. *Indonesian Values and Character Education Journal*, 2(2), 79-86. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IVCEJ/article/view/19495>.
- Nuryana, Z. (2017). Knowledge Management Sebagai Upaya Pengembangan Learning Organization di Lembaga Pendidikan Islam. *LITERASI: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 8(1), 11-19. <https://www.ejournal.almaata.ac.id/index.php/LITERASI/article/view/441>.
- Prayoga, A., Widad, A.L., Marliana, E., Mukarromah, I.S., & Ruswandi, U. (2019). Implementasi Penjaminan Mutu Madrasah. *Murobbi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 70-84. <http://jurnal.iaibafa.ac.id/index.php/murobbi/article/view/183>.

- Priatmoko, S. (2018). Memperkuat Eksistensi Pendidikan Islam di Era 4.0. *Ta'lim: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 1(2), 221-239. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/talim/article/view/948>.
- Priyatna, M. (2017). Manajemen Pengembangan SDM pada Lembaga Pendidikan Islam. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 5(09), 21. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/87>.
- Qolbi, S.K., & Hamami, T. (2021). Implementasi Asas-asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(4), 1120-1132. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/511>.
- Rahelly, Y. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Sumatera Selatan. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 12(2), 381-390. <http://journal.unj.ac.id/unj/index.php/jpud/article/view/9319>.
- Rahman, K. (2018). Perkembangan Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia. *Jurnal Tarbiyatuna: Kajian Pendidikan Islam*, 2(1), 1-14. <http://ejournal.iaibrahimy.ac.id/index.php/tarbiyatuna/article/view/130>.
- Risdiantoro, R. (2021). Pengaruh Pelatihan Guru Terhadap Kinerja Guru Melalui Pengembangan Profesional Guru Madrasah Ibtidaiyah se-Kota Batu. *Khidmatuna: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(2), 144-157. <https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/Khidmat/article/view/184>.
- Roza, J. (2016). Pengaruh Pelatihan dan Pengalaman Mengajar Terhadap Profesionalisme Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) di Kabupaten Tanah Datar. *Al-Fikrah: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 137-146. <https://journals.unihaz.ac.id/index.php/abdihaz/article/view/739>.
- Setiawan, H.S. (2018). Pelatihan Guru dalam Penggunaan Internet of Things pada Madrasah Darussa'adah. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 9(2), 167-176. <http://journal.upgris.ac.id/index.php/e-dimas/article/view/1554>.
- Solichin, M. (2015). Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 6(2), 148-178. <https://mail.journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/486>.
- Sudarman, S. (2019). Kebijakan Internal Madrasah dalam Memenuhi Kepuasan Orang Tua Siswa di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Kulon Progo. *Al-Bidayah: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 11(1), 195-225. <http://jurnal.albidayah.id/index.php/home/article/view/178>.
- Suherman, A. (2014). Implementasi Kurikulum Baru Tahun 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani (Studi Deskriptif Kualitatif pada SDN Cilengkrang). *Mimbar Sekolah Dasar*, 1(1), 71-76. <https://ejournal.upi.edu/index.php/mimbar/article/view/866>.
- Sulistiyorini, S. (2012). Meretas Pendidik Berkualitas dalam Pendidikan Islam. *Repository UIN SATU Tulungagung*. <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/10416>.
- Supandi, A., Sahrazad, S., Wibowo, A.N., & Widiyanto, S. (2020). Analisis Kompetensi Guru: Pembelajaran Revolusi Industri 4.0. *Prosiding Samasta*. <https://jurnal.umj.ac.id/index.php/SAMASTA/article/view/6692>.
- Suryanto, Y. (2017). Analisis Kebijakan Kepala Madrasah dalam Pengembangan Kurikulum Melalui Supervisi Internal (Studi Kasus di MI NU Miftahul Falah Undaan Tengah). *Skripsi*, STAIN Kudus. <http://eprints.stainkudus.ac.id/1254/>.
- Takdir, M., Yusuf, M., & Alimuddin, A. (2020). Analisis Implementasi Kebijakan Manajemen Berbasis Sekolah pada Madrasah Aliyah di Kabupaten Luwu Utara. *Idaarah*, 4(2), 210-229. <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/idaarah/article/download/16258/pdf>.
- Turmuzy, M., & Wahidaturrahmi, W. (2021). Analisis Kompetensi Profesional dan Pedagogik Mahasiswa Pendidikan Matematika dan Implementasi Kurikulum 2013. *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(2), 341-354. <https://edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/301>.
- Umar, M., & Ismail, F. (2018). Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam (Tinjauan Konsep Mutu Edward Deming dan Joseph Juran). *Jurnal Ilmiah Iqra'*, 11(2). <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JII/article/view/581>.
- Wahid, L.A., & Hamami, T. (2021). Tantangan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam dan Strategi Pengembangannya dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Masa Depan. *J-PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 8(1). <http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jpai/article/view/15222>.
- Wahyuni, N.Y. (2018). Pencitraan: Upaya Membangun Public Opinion Bagi Lembaga Pendidikan Islam. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1), 64-79. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/al-tanzim/article/view/249>.
- Werdayanti, A. (2008). Pengaruh Kompetensi Guru dalam Proses Belajar Mengajar di Kelas dan Fasilitas Guru Terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Dinamika Pendidikan*, 3(1). <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/DP/article/view/434>.

- Widyawati, S. (2013). Filsafat Ilmu Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Pendidikan. *Gelar: Jurnal Seni Budaya*, 11(1). <http://jurnal.isi-ska.ac.id/index.php/gelar/article/view/1441>.
- Yanto, M., & Fathurrochman, I. (2019). Manajemen Kebijakan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. *Jurnal Konseling dan Pendidikan*, 7(3), 123-130. <http://repository.iaincurup.ac.id/160/>.
- Yaqin, N. (2016). Manajemen Lembaga Pendidikan Islam. *Madinah: Jurnal Studi Islam*, 3(2), 93-105. <http://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/madinah/article/view/178>.
- Yuliah, E. (2020). Implementasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal At-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan*, 30(2), 129-153. <http://ejournal.staisyamsululum.ac.id/index.php/attadbir/article/view/58>.
- Yusuf, W.F. (2018). Implementasi Kurikulum 2013 (K-13) pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Dasar (SD). *Jurnal Al-Murabbi*, 3(2), 263-278. <http://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/pai/article/view/1097>.
- Zen, W.L. (2016). Manajemen Peningkatan Mutu Lembaga Pendidikan Islam. *Almufida: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman*, 1(1). <https://jurnal.dharmawangsa.ac.id/index.php/almufida/article/view/108>.